

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif (<i>Executive summary</i>)	1
BAB I Pendahuluan	4
BAB II Perencanaan Kinerja	7
BAB III Akuntabilitas Kinerja	8
3.1 Pencapaian Kinerja	8
a. Pencapaian Target Kinerja tahun 2014	8
b. Pencapaian Kinerja Non IKU tahun 2014	11
c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya	18
c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target jangka menengah	20
3.2 Realisasi Anggaran	21
BAB IV Penutup	24
Lampiran-lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridhoNya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2014 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014. Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah menyelesaikan kegiatan pada tahun 2014 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja Inspektorat tahun 2014.

Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target dan capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Inspektorat tahun 2010 – 2014 serta target dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2014. Dalam laporan ini disajikan juga data mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2014 terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja Inspektorat pada tahun 2014. Secara umum sasaran yang direncanakan pada tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu dukungan dan kerja keras semua pihak terus ditingkatkan agar kinerja Inspektorat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, 29 Januari 2015

Inspektur
Badan Tenaga Nuklir Nasional

Dra. Mari Indriana, M.Si
NIP. 19580328 198212 2 001

**IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)**

Laporan Kinerja Inspektorat BATAN disusun dengan semangat reformasi birokrasi, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Inspektorat pada tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tergambar pada pencapaian kinerja Inspektorat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat telah menentukan Sasaran Utama yaitu “Meningkatkan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN ” Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Inspektorat membuat Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang terdiri 3 (tiga) indikator Kinerja Utama dengan capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	5 Unit Kerja (Kumulatif)	100 %	24 Unit Kerja telah dilakukan penilaian sampai dengan tahun 2013, untuk 2014 dilakukan evaluasi dan revisi pedoman WBK sesuai Permenpan No.60 Tahun 2012
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN		Minimal 95 %	91.38%	53 dari 58 Temuan telah ditindaklanjuti, 5 temuan sedang dalam proses	
Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara		Maksimal 5 %	5.17%	3 dari 58 Temuan berindikasi kerugian negara	

Selain melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, terdapat kegiatan lain yang telah dilaksanakan Inspektorat BATAN pada tahun 2014 yaitu:

1. Penilaian Resiko pada unit kerja di kedeputian Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir (SATN) dan Semester II pada unit kerja di kedeputian Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir (PTN).
2. Penilaian Kinerja melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biokrasi (PMPRB).
3. Evaluasi LAKIP 24 Unit Kerja Tahun 2013.
4. Reviu Laporan Keuangan BATAN.
5. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran BATAN.

Di samping kegiatan-kegiatan di atas, Inspektorat juga melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan unit kerja lainnya yaitu:

1. Menjadi bagian tim pengawas pelaksanaan ujian penerimaan CPNS;
2. Menjadi bagian tim Likuidasi satuan kerja PPIN;
3. Menjadi bagian tim penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan advokasi hukum;
4. Menjadi bagian tim BATAN Quality Award;
5. Menjadi bagian tim penyusunan LAKIP BATAN;
6. Menjadi bagian tim penyusunan HSS BATAN;
7. Menjadi bagian tim pemantauan disiplin pegawai;
8. Menjadi bagian tim penyusunan SOP;
9. Menjadi bagian tim TGR;
10. Menjadi bagian tim hibah;
11. Menjadi bagian tim verifikator dan penelaahan *Whistle Blowing System* (WBS) pengadaan barang dan jasa.

Secara keseluruhan target atas indikator kinerja telah dilaksanakan, namun dari capaiannya belum mencapai target yang diharapkan yaitu:

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN yang ditargetkan 95% realisasi pencapaiannya 91,38 %

2. Presentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara yang ditargetkan 5% realisasi pencapaiannya 5,17 %

Penyebab tidak tercapainya target tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yaitu:

1. Beberapa tindak lanjut temuan eksternal memerlukan waktu cukup lama untuk penyelesaiannya karena terkait dengan Instansi di luar BATAN.
2. Tingkat kompleksitas kegiatan BATAN semakin tinggi berisiko ditemukan temuan yang berindikasi kerugian Negara.
3. Masih lemahnya implementasi pengelolaan administrasi (keuangan, perlengkapan, kepegawaian) oleh Satker.
4. Terbatasnya auditor di Inspektorat dalam melaksanakan audit sehingga sulit mendeteksi potensi kerugian Negara pada setiap satuan kerja BATAN.

Upaya kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat adalah:

1. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti.
2. Melakukan mediasi untuk penyelesaian temuan yang sulit ditindaklanjuti.
3. Melakukan pembinaan secara berkala kepada satuan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara, antara lain melalui sosialisasi, asistensi dll.
4. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai katalisator dalam bentuk konsultan dan *quality assurance*.
5. Secara berkala menambah jumlah auditor yang disesuaikan dengan beban kerja Inspektorat yang semakin meningkat.

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 tahun 2013 bahwa tugas dan fungsi Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN. Selanjutnya tugas dan fungsi dijabarkan dalam visi dan misi Inspektorat serta dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Dalam pelaksanaannya Renstra tersebut dijabarkan dalam perjanjian kerja setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan. Berkaitan dengan tugas dan fungsi, Inspektorat berupaya mendorong terwujudnya good governance di BATAN. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu kebijakan dan strategi yaitu :

1. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Kebijakan pengawasan Inspektorat BATAN mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
- b. Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat.
- c. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercakup didalamnya mengenai Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004.

2. Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain:

- a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan dengan cara:
 - 1) Meningkatkan kemampuan pengawasan Inspektorat BATAN, yaitu:
 - a) Meningkatkan wawasan dan keterampilan auditor melalui pendidikan, kursus / pelatihan, ceramah, penataran dan sebagainya.
 - b) Melengkapi kekurangan tenaga Auditor secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi.
 - c) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat BATAN sesuai dengan Standar BATAN.

- 2) Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja (*Performance Audit*), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja unit kerja di BATAN secara menyeluruh / komprehensif.
- 3) Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program BATAN dan aspek pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi, berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
- 6) Meningkatkan ketersediaan anggaran melalui koordinasi dengan instansi lainnya yang berwenang di bidang pengawasan (BPKP, MENPAN, APIP).
- 7) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan cara:
 - a) Mewajibkan kepada masing – masing eselon II, selaku penanggung jawab program unit kerja untuk menyampaikan tanggapan/ penjelasan terhadap setiap laporan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat, maupun BPK/BPKP.
 - b) Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kewajiban tersebut diatas, dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
 - c) Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong kecepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.

Dalam pelaksanaannya kebijakan dan strategi telah diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat namun perlu disadari masih terdapat permasalahan yang timbul dilapangan. Masalah utama yang dihadapi oleh Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah tenaga auditor di Inspektorat kurang memadai dan kecakapan/ kemampuan Auditor yang ada belum merata disatu sisi kegiatan di Inspektorat selalu bertambah.

Upaya yang terus dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Secara bertahap menambah tenaga auditor yang disesuaikan dengan beban kerja di Inspektorat.
2. Senantiasa meningkatkan profesionalisme auditor melalui sistem pengembangan profesi, diklat teknis, workshop, seminar, studi banding dan lain sebagainya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang dituangkan dalam penetapan kinerja merupakan janji kinerja serta komitmen untuk mencapai target kinerja tahunan yang disepakati antara pihak penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab kinerja.

Penetapan Kinerja Inspektorat pada tahun 2014 dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2014**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Peningkatan Kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	5 Unit Kerja (Kumulatif)
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	95 %
		Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara	5 %

1. Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi di BATAN.

Pada tahun 2014 Inspektorat merencanakan melakukan penilaian WBK terhadap 1 unit kerja. Sejalan dengan itu juga merevisi Pedoman Penilaian WBK sesuai dengan PerMenpanRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

Pada tahun 2014 Inspektorat merencanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN dengan target minimal sebesar 95%.

3. Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.

Pada tahun 2014 Inspektorat meminimalkan jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara dengan target maksimal 5%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Kinerja

a. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2014

Tabel 2
Pengukuran Kinerja Inspektorat Tahun 2014

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) melalui pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	5 Satker (Kumulatif)	100 %	100%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	95 %	53 temuan telah ditindak lanjuti dari total 58 Temuan	91.38%
		Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	5 %	3 temuan kerugian Negara dari total 58 Temuan	5.17%

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN

Dalam rangka mewujudkan zona integritas dan pembentukan WBK di BATAN perlu dilakukan penilaian WBK terhadap unit kerja. Untuk melakukan penilaian tsb dibentuklah Tim Penggerak WBK yang beranggotakan beberapa pejabat Eselon II serta melibatkan narasumber dari Kementrian PAN&RB. Tahun 2014 selain melakukan evaluasi seluruh unit kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tim Penggerak juga melakukan revisi Peraturan Kepala BATAN nomor 80 tahun 2011 tentang Pedoman WBK di BATAN untuk disesuaikan dengan PerMenpanRB Nomor 60 Tahun 2012. Hasilnya setelah

melalui rapat bersama Tim WBK dan melibatkan BHHK sebagai narasumber penyusunan peraturan, terbitlah Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BATAN. Selain revisi pedoman, telah disusun beberapa draft peraturan yang terkait penilaian WBK yaitu:

1. Pengendalian gratifikasi
2. Penanganan Benturan Kepentingan
3. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK
4. Mekanisme Pengaduan Masyarakat
5. Mekanisme *wishleblower* system

Dokumen tersebut disusun untuk melengkapi indikator penilaian WBK/WBBM oleh Kementerian PAN&RB di BATAN

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp. 243.016.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 240.000.000,-

Kesimpulan:

Secara keseluruhan pelaksanaan penilaian WBK telah tercapai 100% dengan hasil 24 unit kerja telah berpredikat WBK .

2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN

Sasaran kegiatan untuk tahun 2014 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut temuan Inspektorat sesuai PKPT dan di luar PKPT dan terlaksananya evaluasi tindak lanjut temuan BPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua temuan yang terdapat dalam LHP Inspektorat dan LHP BPK telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat maupun BPK.

Dari 58 temuan eksternal maupun internal yang terdapat pada tahun 2014 yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 53 temuan dan yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 5 temuan. Dengan demikian capaian prosentase tindak lanjut rekomendasi temuan internal dan eksternal sebesar 91.38% Capaian tersebut belum dapat

melampaui target yang direncanakan minimal sebesar 95%.

Dikarenakan terdapat beberapa tindak lanjut temuan eksternal yang memerlukan waktu cukup lama untuk penyelesaiannya karena terkait dengan Instansi di luar BATAN. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Pemeriksa	Jumlah Temuan	Sudah ditindaklanjuti	Dalam Proses tindak lanjut
1	BPK	25	20	5
2	Inspektorat	33	33	-
	Jumlah	58	53	5

Upaya yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti. Selain itu, dilakukan mediasi untuk penyelesaian temuan yang sulit ditindaklanjuti.

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp.87.330.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.512.500,-

Kesimpulan:

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, namun pencapaiannya belum sesuai dengan target.

3) Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara

Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara, target inspektorat maksimal sebesar 5%, realisasi tahun 2014 sebesar 5,17%. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara sebanyak 3 temuan BPK dari total 58 temuan yang merupakan jumlah kumulatif temuan BPK dengan jumlah temuan inspektorat. Target inspektorat maksimal hanya 5% dan realisasinya hanya 5,17% jadi secara keseluruhan pencapaian masih belum sesuai target. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

- a. Tingkat kompleksitas kegiatan BATAN semakin tinggi berisiko ditemukan temuan yang berindikasi kerugian Negara.
- b. Masih lemahnya implementasi pengelolaan administrasi (keuangan, perlengkapan, kepegawaian) oleh Satker.

- c. Terbatasnya auditor di Inspektorat dalam melaksanakan audit sehingga sulit mendeteksi potensi kerugian Negara pada setiap satuan kerja BATAN.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi presentase kerugian Negara adalah:

- a. Melakukan pembinaan secara berkala kepada satuan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara, antara lain melalui sosialisasi, asistensi dll.
- b. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai katalisator dalam bentuk konsultan dan *quality assurance*.
- c. Secara berkala menambah jumlah auditor yang disesuaikan dengan beban kerja Inspektorat yang semakin meningkat.

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp.1.283.791.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.153.085.400,-

Kesimpulan:

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, namun pencapaiannya belum sesuai dengan target.

b. Pencapaian Kinerja Non IKU Tahun 2014

1) Monitoring dan Penerapan SPIP di BATAN.

Selama Tahun 2014, Inspektorat BATAN telah memfasilitasi pelaksanaan penilaian risiko melalui FGD terhadap unit kerja dibawah kedeputian SATN dan kedeputian PTN, yaitu:

- Penilaian risiko pada Deputi Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir (SATN)

No.	Pusat	Judul Kegiatan
1.	Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan vaksin malaria dengan radiasi pengion - Kalibrasi keluaran pesawat terapi linac - Uji kelayakan peralatan radiografi gamma industri
2.	Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PATIR)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelepasan varietas unggul tanaman pangan melalui aplikasi radiasi. - Pengembangan jasa layanan NDT yang prima

3.	Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi berkas neutron untuk penelitian bahan maju dan industri - Penelitian dan pengembangan baterai lithium berbasis elektrolit padat
4.	Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan senyawa bertanda dan uji biologis terhadap hewan percobaan - Pengelolaan limbah B3 di PSTNT
5.	Pusat Sains dan Teknologi Akselerator	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan teknologi pembuatan partikel bahan bakar terlapis. - Pengembangan dan rancang bangun mesin berkas elektron untuk vulkanisasi lateks karet alam

- *Diagnostic Assessment* dan penilaian risiko pada Deputi Pendayagunaan Teknologi Nuklir (PTN):

No.	Pusat	Judul Kegiatan
1.	Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Iradiator Gamma untuk Pengawetan Produk Pertanian. - Perekayasaan prototipe Portal Monitor Radiasi Non Spektroskopi
2.	Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG)	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Iradiasi Isotop di RSG-GAS - Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Reaktor di RSG-GAS
3.	Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Lu-177-DOTA-Trastuzumab untuk Radioimunoterapi - Pembuatan Sumber Tertutup Ir-192 HDR untuk Terapi kanker
4.	Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan Edukasi Iptek Nuklir - Promosi Hasil Litbang BATAN
5.	Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer dan website. - Peningkatan Kualitas Layanan Pemantauan Dosis Personil, Lingkungan dan Kedaruratan.

Dengan dilakukannya kegiatan tersebut unit kerja dapat mengidentifikasi, menganalisis serta mengendalikan risiko sehingga dapat meminimalkan kegagalan

pencapaian tujuan unit kerja.

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp. 274.448.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 273.344.500,-

Kesimpulan:

Realisasi pelaksanaan SPIP Tahun 2014 dapat tercapai 100% dengan output sbb:

1. Laporan Hasil FGD masing-masing unit kerja
2. Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Deputi Bidang SATN dan PTN.

2) Penilaian Kinerja melalui PMPRB

Pada Tahun 2014 telah dilakukan evaluasi RB oleh Tim asesor (Tim PMPRB) BATAN menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pada tanggal 11 Juli 2014 dilaksanakan evaluasi dan pengisian PMPRB secara online. Dari hasil evaluasi diperoleh Indeks RB senilai 80,95, dengan rincian sebagai berikut:

PROSES		%	HASIL		%
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)	4.92	98.33 %	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)	15.26	76.3 %
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)	5	100 %	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	7.9	79 %
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)	6	100 %	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	7.5	75 %
PENATAAN TATALAKSANA (5)	5	100 %	TOTAL HASIL (40)	30.66	102.2%
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	10.27	68.49 %	INDEKS RB (100)	80.95	
PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)	6	100 %			
PENGUATAN PENGAWASAN (12)	8.32	69.31 %			
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)	4.79	79.77 %			
TOTAL PROSES (60)	50.29	83.82%			

Dampak dari dilakukan kegiatan Penilaian Kinerja melalui PMPRB adalah dapat diketahui kelemahan kinerja pada unit kerja sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja melalui 8 (delapan) area perubahan.

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp. 205.068.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 205.068.000,-

Kesimpulan:

Realisasi pelaksanaan PMPRB Tahun 2014 dapat tercapai 100%, dengan output dalam bentuk Laporan PMPRB.

3) Evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan

• Evaluasi LAKIP BATAN

Inspektorat Telah melaksanakan Evaluasi terhadap 24 Unit Kerja di BATAN. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi; perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja. Dari hasil evaluasi Inspektorat diperoleh nilai rata-rata untuk BATAN adalah 87,47 dapat dilihat pada rincian di bawah:

Komponen/Sub Komponen		Nilai Total Rata-Rata
A. Perencanaan Kinerja	(40%)	36,89
I. Perencanaan Strategis	(15%)	13,59
II. Perencanaan Kinerja Tahunan	(25%)	23,30
B. Pengukuran Kinerja	(25%)	21,95
I. Pemenuhan Pengukuran	(5%)	5,00
II. Kualitas Pengukuran	(12%)	11,40
III. Implementasi Pengukuran	(8%)	5,55
C. Pelaporan Kinerja	(25%)	20,99
I. Pemenuhan Pelaporan	(5%)	4,58
II. Penyajian Informasi Kinerja	(13%)	11,16

III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (7%)	5,25
D.Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (10%)	7,43
I. Kinerja yang Dilaporkan (10%)	7,43
Total	87,47

Dampak dari dilakukan kegiatan evaluasi LAKIP dapat diketahui sistem akuntabilitas kinerja pada unit kerja sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja unit kerja dan ikut berkontribusi terhadap diperolehnya kategori baik (B) oleh KeMenpan RB.

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp.124.565.000,- dengan realisasi sebesar Rp.122.813.825,-

Kesimpulan:

Realisasi pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP Tahun 2014 dapat tercapai 100% dengan output dalam bentuk Laporan Ikhtisar Evaluasi LAKIP.

- Reviu Laporan Keuangan BATAN

Pada tahun 2014, Inspektorat telah melaksanakan 2 kali reviu laporan keuangan, yaitu reviu Laporan Keuangan BATAN Tahun 2013 dengan laporan No. 150/WP.00/ISP.2/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan reviu Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2014 dengan laporan No. R.327/WP.00/ISP.2/2014 tanggal 25 Juli 2015.

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan yang akurat dan andal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga ikut berkontribusi terhadap diperolehnya opini WTP oleh BPK.

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp.28.945.000,- dengan rarealisasi sebesar Rp.27.530.000,-

Kesimpulan:

Realisasi pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan BATAN dapat tercapai 100% dengan output berupa Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN.

4) Reviu RKA- BATAN 2014

Pada tahun 2014 Inspektorat telah melakukan reviu RKA untuk 23 unit kerja.

Pelaksanaan reviu telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu,

- Bulan April pada saat perubahan APBNP Tahun 2014;
- Bulan Juli pada saat ditetapkan pagu anggaran Tahun 2015;
- Bulan September-Oktober setelah diperolehnya alokasi anggaran Tahun 2015.

Dampak dengan dilakukan kegiatan ini adalah diperolehnya RKA unit kerja yang berkualitas sehingga potensi penyimpangan pengelolaan anggaran dapat diantisipasi secara dini.

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp.127.804.000,- dengan realisasi sebesar Rp.126.369.800,-

Kesimpulan:

Secara keseluruhan pelaksanaan reviu RKA unit kerja di BATAN telah dilakukan 100%, dengan menghasilkan output berupa Laporan Hasil Reviu RKA Unit Kerja.

5) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan

Realisasi pemeriksaan sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)

Tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) obyek pemeriksaan dengan rincian sbb:

OBYEK PEMERIKSAAN		RENCANA	REALISASI
1	Pusat Standardisasi Mutu Nuklir.	Maret	10 Maret 2014
2	Pusat Teknologi Limbah Radioaktif	April	5 Juni 2014
3	Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir	Mei	16 Juni 2014
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Juni	18 Agustus 2014

5	Pusat Diseminasi dan Kemitraan	Juli	23 September 2014
6	Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi	Agustus	12 Nopember 2014
7	Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan	Nopember	4 Desember 2014
8	Pusat Sains dan Teknologi Akselerator	Nopember	11 Desember 2014
9	Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir	Nopember	11 Desember 2014
10	Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir	September	22 Desember 2014
11	Kantor Pusat BATAN	Oktober	22 Desember 2014

Realisasi pemeriksaan diluar PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) obyek pemeriksaan dengan rincian sbb:

OBYEK PEMERIKSAAN		RENCANA	REALISASI
1	Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi	-	8 Mei 2014
2	Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka	-	14 Juli 2014

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada berkurangnya temuan yang sejenis dan berindikasi kerugian Negara sesuai peran Inspektorat sebagai katalisator sehingga ikut berkontribusi terhadap diperolehnya opini WTP oleh BPK.

Kegiatan tersebut didukung Anggaran sebesar Rp.441.906.000,- dengan realisasi sebesar Rp.425.989.225,-

Kesimpulan:

Secara keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan pada unit kerja di BATAN telah dilakukan 100%, dengan menghasilkan output berupa Laporan Hasil Audit (LHA).

Di samping kegiatan-kegiatan di atas, Inspektorat juga melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan unit kerja lainnya yaitu:

1. Menjadi bagian tim pengawas pelaksanaan ujian penerimaan CPNS;
2. Menjadi bagian tim Likuidasi satuan kerja PPIN;
3. Menjadi bagian tim penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan advokasi hukum;
4. Menjadi bagian tim BATAN Quality Award;
5. Menjadi bagian tim penyusunan LAKIP BATAN;
6. Menjadi bagian tim penyusunan HSS BATAN;
7. Menjadi bagian tim pemantauan disiplin pegawai;
8. Menjadi bagian tim penyusunan SOP;
9. Menjadi bagian tim TGR;
10. Menjadi bagian tim hibah;
11. Menjadi bagian tim verifikator dan penelaahan *Whistle Blowing System (WBS)* pengadaan barang dan jasa.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3
Perkembangan Capaian Kinerja Selama Periode Renstra 2010-2014

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	80 %	100 %	100%	100%	100%
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	95 %	94.00%	100.00%	86.36%	91.38%
3	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	6,5 %	7.00%	5.38%	5.68%	5.17%

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

1) Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN

Terdapat perubahan metode pelaksanaan antara tahun 2014 dengan 2013. Pada tahun 2013 dilakukan penilaian sebanyak 9 Unit Kerja, sedangkan untuk tahun 2014 tidak dilakukan penilaian karena seluruh unit kerja secara komulatif sudah dilakukan penilaian sampai dengan 2013. Pada tahun 2014 hanya dilakukan evaluasi penilaian terhadap 24 unit kerja serta revisi pedoman WBK disesuaikan dengan peraturan Kemenpan&RB.

2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

Capaian kinerja pada IKU ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013 mengalami kenaikan dari 86.36% menjadi 91.37 %. Hal ini di karenakan bertambahnya jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Temuan	Temuan Yang Sudah ditindaklanjuti	Capaian
1.	2013	88	76	86.36%
2.	2014	58	55	91.37%

3) Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara

Capaian kinerja pada IKU ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,51% yaitu dari 5.68% pada tahun 2013 menjadi 5.17 % pada tahun 2014. Hal ini di karenakan berkurangnya jumlah temuan yang merugikan Negara pada tahun 2014. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Temuan	Temuan Yang Berindikasi Kerugian Negara	Capaian
1.	2013	88	5	5.68 %
2.	2014	58	3	5.17 %

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 4
Perbandingan Tahun 2014 Dengan Rencana 5 tahun (akhir periode Renstra)

No	Indikator Kinerja	Target s/d akhir periode Renstra	Target s/d Tahun N [*])	Realisasi s/d Tahun N [*])	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	24 Unit Kerja	100%
2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN	95 %	95 %	91,38%	96.19%
3.	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	5 %	5 %	5,17 %	96.60%

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1) Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN

Tahun 2014 adalah tahun terakhir periode Renstra (2010-2014), target keseluruhan selama 5 tahun adalah sebanyak 5 unit kerja dan realisasi sampai dengan akhir tahun periode renstra adalah sebanyak 24 Unit kerja. Hasil penilaian unit Kerja berpredikat WBK setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- Tahun 2010 : Penyusunan Pedoman WBK
- Tahun 2011 : 10 Unit Kerja
- Tahun 2012 : 5 Unit Kerja
- Tahun 2013 : 9 Unit Kerja
- Tahun 2014 : Evaluasi Penilaian WBK dan Revisi Pedoman WBK

Untuk tahun 2014 dilakukan revisi pedoman dikarenakan adanya peraturan baru dari Kementerian PAN dan RB tentang Pedoman Penilaian WBK/WBBM.

2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.

Target presentase penyelesaian tindak lanjut setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2010 inspektorat hanya menargetkan minimal 80% sedangkan tahun 2014 inspektorat menargetkan minimal 95% temuan pihak

eksternal dan internal telah ditindaklanjuti. Capaian kinerja tahun 2014 untuk IKU ini adalah sebesar 91.38% sehingga tidak sesuai dengan target akhir tahun renstr, namun apabila di bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya jumlah tindak lanjut temuan mengalami kenaikan, rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Pemeriksaan Tahun	Jumlah Temuan	Temuan Yang belum ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
1.	2010	108	5	80%	95%	100%
2.	2011	52	3	85%	94%	100%
3.	2012	93	93	90%	100%	100%
4.	2013	88	12	95%	86,36%	90.90%
5.	2014	58	5	95%	91.38%	96.19%

3) Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara

Target berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2010 inspektorat menargetkan maksimal 20% sedangkan tahun 2014 inspektorat menargetkan maksimal 5% berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara. Capaian kinerja tahun 2014 untuk IKU ini adalah sebesar 5.17%. Realisasi capaian kinerja tidak sesuai dengan target akhir tahun renstra, namun apabila di bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara mengalami penurunan, rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Pemeriksaan Tahun	Jumlah Temuan	Temuan Yang berindikasi kerugian Negara	Target	Realisasi	Capaian
1.	2010	108	7	20%	6.5%	100%
2.	2011	52	4	15%	7,69%	100%
3.	2012	93	5	10%	5.38%	100%
4.	2013	88	5	5%	5.68%	86,40%
5.	2014	58	5	5%	5.17%	96.60 %

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2014, Inspektorat mendapatkan dana dari APBN untuk membiayai seluruh kegiatannya sebesar Rp.5.218.118.000,- terealisasi sebesar Rp.5.098.832.539,- atau sebesar 97.71%. Sisa dana sebesar Rp.119.285.561,- merupakan sisa anggaran dari perawatan kendaraan roda 4 dikarenakan adanya penghapusan kendaraan roda 4 pada tahun 2014 dan sisa anggaran dari gaji pegawai. Dengan demikian Inspektorat telah

efektif dalam pelaksanaan penggunaan anggaran. Rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2014

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
P	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BATAN.	5.218.118.000,-	5.098.832.539,-	97,71
K	Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan aparatur.	5.218.118.000,-	5.098.832.539,-	97,71
O	Laporan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK/BPKP) dan internal BATAN serta berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara.	1.176.721.000,-	1.168.819.725,-	99,33%
O	Peningkatan kinerja unit kerja untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di BATAN.	850.336.000,-	845.359.550,-	99,41%
K	Pembentukan wilayah bebas dari korupsi.	243.016.000,-	240.789.200,-	99,08%
K	Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP di BATAN.	274.448.000,-	273.344.500,-	99,60%
K	Penilaian Kinerja.	205.068.000,-	204.856.050,-	99,90%
K	Reviu RKAKL Tahun 2015.	127.804.000,-	126.369.800,-	98,88%
K	Evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan.	124.565.000,-	122.813.825,-	98,60%
K	Evaluasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan Inspektorat dan BPK.	163.820.000,-	162.944.400,-	99,50%
O	Laporan dukungan administrasi layanan perkantoran	980.751.000,-	963.077.225,-	98,20%
S	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	441.906.000,-	425.989.225,-	96,40%
O	Layanan Perkantoran	3.060.646.000,-	2.966.935.589,-	96,94%

Tabel 6
Trend Anggaran Inspektorat 5 Tahun

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2010	2.747.154.000,-	2.698.506.928,-	98.23
2011	3.484.296.000,-	3.293.435.982,-	94.52
2012	4.762.470.000,-	4.544.632.376,-	95.43
2013	5.198.535.000,-	4.891.493.565,-	94.09
2014	5.218.118.000,-	5.098.832.539,-	97.71

Anggaran Inspektorat pada tahun 2014 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Rincian anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dari tahun ke tahun dalam periode renstra 2010 s.d 2014 trend Anggaran Inspektorat mengalami kenaikan. Trend anggaran tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 1



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2014 ini telah menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, yang tercermin dalam indikator kinerja kegiatan pada tahun 2014. Disamping itu juga telah disajikan kegiatan Inspektorat lainnya yang tidak tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2014 serta pencapaiannya.

Pada tahun 2014 secara umum Inspektorat telah merealisasikan seluruh kegiatan untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2010-2014. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan Renstra dan dokumen perencanaan lainnya.

Secara umum capaian kinerja Inspektorat tahun 2014 disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebanyak 1 (satu) IKU telah mencapai target 100% sesuai yang telah ditetapkan, yaitu IKU “Jumlah wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN”. Sampai dengan tahun 2014 target untuk mendapatkan 5 unit kerja berpredikat WBK telah terpenuhi 100%. Selain itu telah dilakukan revisi Peraturan Kepala BATAN nomor 80 tahun 2011 tentang Pedoman WBK di BATAN.
2. Sebanyak 2 (dua) IKU belum mencapai target sesuai yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU “Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN, target 95% realisasi pencapaiannya sebesar 91,38%.
 - b. IKU “Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara” target 5% realisasi pencapaiannya sebesar 5.17% .

Upaya ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat adalah:

1. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti.
2. Melakukan mediasi untuk penyelesaian temuan yang sulit ditindaklanjuti.
3. Melakukan pembinaan secara berkala kepada satuan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara, antara lain melalui sosialisasi, asistensi dll.
4. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai katalisator dalam bentuk konsultan dan *quality assurance*.
5. Secara berkala menambah jumlah auditor yang disesuaikan dengan beban kerja Inspektorat yang semakin meningkat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2014, Inspektorat telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang selanjutnya akan digunakan untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang.